

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu sektor yang berpengaruh bagi pembangunan nasional karena menjadikan sektor yang andalan dalam pendapatan dan peningkatan devisa. Potensi-potensi wisata saat ini mulai diperhatikan dari segi pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata merupakan kegiatan yang terdiri dari berbagai macam wisata serta didukung dengan beragam fasilitas serta layanan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan daerah. Kepariwisataan adalah kegiatan dalam bidang pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta wujud interaksi para wisatawan dengan masyarakat dan juga pemerintah. Pariwisata memberikan banyak sekali layanan serta kegiatan yang melibatkan masyarakat, para pengusaha, dan pemerintah. Pariwisata sendiri dalam arti luas adalah perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, bersifat sementara dan dapat dilakukan individu maupun berkelompok (Prabowo & Pamurti, 2021).

Pariwisata dapat menjadi sektor penggerak perekonomian yang memerlukan perhatian sehingga dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan pengembangan wisata di berbagai terminologi seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan pariwisata pedesaan. Kepariwisataan adalah pendekatan pengembangan pariwisata untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata. Salah satunya adalah pendekatan pengembangan pariwisata untuk pembangunan wisata desa pada sektor pariwisata (Undang-undang Kepariwisataan No.10 Tahun 2009).

United Nation World Tourism Organizationz (UNWTO) berpendapat bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan dan menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan wilayah suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah destinasi dan investasi pariwisata menjadi sektor pariwisata yang penting dalam peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Sektor pariwisata akan menciptakan pembangunan pariwisata untuk mengubah dan menciptakan nilai tambah di segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana-prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan aspek lainnya.

Pariwisata pedesaan merupakan aktivitas pariwisata di wilayah non-perkotaan dimana aktivitas manusia secara langsung terlibat, terutama di bidang pertanian. Pariwisata dengan ciri-ciri yang unik, memiliki khas serta ramah lingkungan menjadi hal baru bagi pengembangan kepariwisataan di dunia. Sebagai respon atas pergeseran minat wisatawan, tumbuh pilihan wisata baru berupa desa-desa wisata di berbagai provinsi Di Indonesia (Susyanti & Latianingsih, 2017). Wisata desa adalah kegiatan kepariwisataan yang memberikan suasana keasrian desa seperti pemandangan alam desa yang indah, Tidak hanya pemandangan tetapi bisa kuliner, cenderamata, *homestay* dan sebagainya (Sudibya, 2018). Pembangunan pariwisata desa perlu terus dibangun dan dikembangkan agar tumbuh secara optimal, dalam pembangunan pariwisata desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya

yang terbatas, Diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan-tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di desa. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kerjasama untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (Irtifah & Ghufro, 2019). Pembangunan pariwisata sebagian besar diterapkan dalam pariwisata perdesaan dimana desa merupakan suatu tempat yang memiliki potensi wisata yang terjaga keasliannya.

Wisata desa secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengajak wisatawan untuk berkunjung ke desa, kemudian melihat dan mempelajari keaslian desa sesuai dengan keunikan dan potensi desa yang dimilikinya dan merupakan tujuan wisata desa (Dewi, 2013). Adanya pembangunan wisata untuk mengetahui potensi desa, salah satunya dengan membuat perencanaan pembangunan wisata desa yang melibatkan kontribusi masyarakat sekitar perdesaan dan pelestarian lingkungan area pedesaan, agar terencana dengan baik dan terstruktur (Astuti, 2016). Perencanaan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik menjadi dasar untuk sebuah kegiatan suatu pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perencanaan yang baik dan tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Ariadi, 2019). Sukuryadi *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa perencanaan adalah sebuah proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai macam alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu untuk masa akan datang.

Perencanaan pembangunan wisata desa merupakan sebuah cara dengan pariwisata yang berwawasan lingkungan, alam, dan budaya, tidak lepas dari daya dukung lingkungan di perdesaan. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagai kunci dalam pengembangan pariwisata. Hal ini tidak jauh dari peran masyarakat yang cukup penting dalam mendukung wisata desa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang muncul dari alam, sosial budaya atau ekonomi masyarakat. Tentunya hal tersebut membutuhkan perencanaan yang baik supaya mendukung potensi wisata perdesaan. Saat ini, wisata lokal di desa sangat diminati wisatawan karena alam, lingkungan dan unsur-unsur lainnya yang menarik wisatawan (Hendrawati *et al.*, 2021). Sebuah perencanaan ada yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan daerah. Sebuah penganggaran yang baik juga mampu menyusun program atau susunan kerja secara terstruktur sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa. Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan berkaitan. Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran (Baihaqi *et al.*, 2019).

Perlunya upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 21 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pedoman umum pembangunan desa tersebut memberikan acuan bagi masyarakat desa, pemerintah desa, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, pihak ketiga.

Madura adalah pulau dengan destinasi wisata yang terletak di bagian Timur, Jawa Timur. Pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan luas dan biru serta aneka ragam keidahan alamnya. Madura memiliki empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang memiliki keunikan dan potensi wisata masing-masing. Menurut S. Arifin, (2017) Pulau Madura yang memiliki banyak potensi di pariwisata, mulai dari keanekaragaman hayati, keindahan alam, potensi wisata alam dan peninggalan sejarah budaya. Jika dapat mengembangkan potensinya lebih baik, maka hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat Madura. Salah satu potensi yang dikembangkan Madura adalah ekowisata bahari, dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dikembangkan melalui pendekatan konservasi alam.

Table 1.1 Rata-rata Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata Di Madura Tahun 2020

NO	KABUPATEN	Jumlah Daya Tarik Wisata Madura	
		WISMAN	WISNUS
1	Bangkalan	1,56	38.446,04
2	Sampang	-	10.864,71
3	Pamekasan		26.347,33
4	Sumenep	52,52	68.058

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Tabel 1.1 rata-rata data jumlah pengunjung daya tarik wisata Di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep terlihat bahwa jumlah terbanyak wisatawan adalah Kabupaten Sumenep dan kedua adalah Bangkalan. Kabupaten Bangkalan berada pada posisi kedua namun Bangkalan tetap menjadi wisata yang menarik pengunjung dengan dibuktikan kabupaten yang paling dekat dengan dengan kota sentral Surabaya yang dihubungkan dengan Jembatan Nasional Suramadu, kearifan lokal dan bentuk bentang alamnya yang indah berpotensi bagi Kabupaten Bangkalan menjadi pusat pariwisata di Pulau Madura karena tempatnya yang mudah untuk dijangkau melewati jembatan suramadu juga memiliki beberapa bentang alam yang indah yang dapat di gunakan sebagai tempat pariwisata.

Madura memiliki keunikan tersendiri dengan memiliki banyaknya potensi wisata alam, sehingga madura disebut dengan hidden paradise. Hidden paradise adalah istilah dimana artinya adalah pariwisata tersembunyi, istilah ini cocok bagi Pulau Madura karena memiliki beragam potensi wisata, baik dari wisata sejarah, wisata budaya, maupun wisata religi yang tersebar dalam empat kabupaten. Dalam wisata sejarah, Pulau Madura memiliki sejarah yang cukup panjang seperti yang tertulis dalam sejarah Babat Madhura, dengan cerita singkat kerajaan yang pernah berkuasa Di Pulau Madura seperti Raja Arya Wiraraja Sumenep lengkap, lalu ada Kerajaan Ronggosukowati yang berkuasa Di Kabupaten Pamekasan, termasuk yaitu Kerajaan Arosbaya sampai kepada Pangeran Trunojoyo yang berkuasa di daerah barat pulau Madura. Diantara beberapa kerajaan tersebut masih beberapa artefak peninggalannya sebagai bukti sejarah panjang kehidupan di Pulau Madura. Adanya

keunikan dan sejarah yang membuat pengunjung tertarik berwisata Di Madura (S. Arifin, 2017).

Tahun 2009, Kabupaten Bangkalan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 tentang visi “Terwujudnya Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan menjadi Pintu Utama atau Gerbang Madura Menuju Kota Industri, Pariwisata dan Jasa”. Hal ini juga didukung dengan diresmikan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura (bagian Timur Kamal). Pembangunan Jembatan Suramadu ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di Pulau Madura dalam segi infrastruktur dan ekonomi Madura. Madura yang relatif tertinggal diantara kawasan lain Di Jawa Timur. Dengan adanya jembatan ini berharap akan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian, distribusi barang dan jasa, dan terutama Di Kabupaten Bangkalan adalah kabupaten yang akan pertama kali tiba setelah melewati Jembatan Suramadu (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan).

Tabel 1.2 Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangkalan 2020

NO	DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BANGKALAN	JUMLAH	
		WISMAN (2020)	WISNUS (2020)
1	Api Alam Konang	0	469
2	Gunung Geger	0	2,197
3	Kerapan Sapi	0	0
4	Kolla Langgundih	0	326
5	Makam Air Mata Ibu	12	139,315
6	Makam Sultan Abdul Kadirun	0	10,166
7	Makam Syeichona Cholil	24	737,210
8	Mercusuar	0	0
9	Museum Bangkalan	0	80
10	Pantai Maneron	0	618
12	Pantai Siring Kemuning	0	1,389

13	Taman Rekreasi Kota	0	8,661
14	Bukit Kapur Jaddih	0	8,278
15	Pelalangan	0	4,574
16	Hutang mangrove Kec. Sepuluh	0	16,785
17	Makam Sunan Cendana	0	2,290
18	Air Tejun Bidadari (Burdhan)	0	677
19	Air Terjun Kec. Galis	0	996
20	Pantai Bumi Anyar	0	2,722
21	Pantai Biru	3	23,698
22	Goa Kuning Plebunan	0	0
23	Pantai Goa Petapa	0	0
24	Pantai Tlangoh	0	0
25	Kampung Batik Paseseh	0	0
	Jumlah	39	961,151

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan daftar pengunjung wisata Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, jumlah pengunjung wisatawan asing (wisman) adalah 39 orang dan wisatawan nusantara (wisnus) adalah 961,151. Kabupaten bangkalan memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin berwisata disana, karena Bangkalan memiliki potensi wisata yang beraneka ragam baik dari segi wisata alam, budaya dan kuliner yang terkenal semua ada Di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan industri pariwisata yang sangat pesat di kota, selain sumber daya alam, Kabupaten Bangkalan memiliki kebudayaan yang unik serta agama yang kuat merupakan ciri khas masyarakat Bangkalan, tidak hanya kebudayaan, ada wisata alam yang terbaru dan cukup populer yaitu Wisata Pantai Biru (Nurlita *et al.*, 2022). Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari segi wisata religi yang paling banyak dikunjungi adalah Makam Syeichona Cholil. Tetapi, dari segi wisata pantai yang paling banyak adalah Pantai Biru.

Menurut Muhammad *et al.*, (2022), Wisata Pantai Biru merupakan wisata buatan yang dibangun manusia dan dibentuk sedemikian rupa oleh warga desa yang dahulunya hanya tempat untuk pembuangan akhir, sehingga menjadi pantai yang sangat indah, dengan keunikan foto dan terdapat wahana untuk bermain. Dibangun pada tahun 2018 dapat dikatakan bahwa Pantai Biru tergolong wisata baru, tetapi daya minat pengunjung wisata ini tetap meningkat. Wisata ini selain dibangun untuk hiburan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem pengelolaan BUMDes setempat. Pantai Biru berada Di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Berada Di Desa Telaga Biru, sebelumnya Desa ini cukup terkenal dengan batik, jika berkunjung di Desa Telaga Biru maka akan disuguhkan dengan aneka macam batik. Pantai Biru saat ini mulai populer di penduduk lokal di Kecamatan Tanjung Bumi. Menurut penjelasan warga sekitar Desa Telaga Biru, pantai ini dinamakan Pantai Biru karena warna air dari pantai tersebut berwarna hijau, akan tetapi masyarakat Madura sudah terbiasa mengatakan warna hijau dengan warna biru. Maka akhirnya pantai tersebut diberi nama Pantai Biru (Muhammad & Farid Ardyansyah, 2022).

Tabel 1.3 Obyek Wisata Pesisir Kab. Bangkalan-Madura Tahun 2020

No	Nama Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung
1.	Pantai Maneron	618
2.	Pantai Rongkang	700
3.	Pantai Siring Kemuning	1.389
4.	Pantai Hutan Mangrove Kec.Sepulu	16.785
5.	Pantai Bumi Anyar	2.722
6.	Pantai Biru	23.698

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Wisata Pantai Biru menduduki posisi pertama dengan jumlah pengunjung terbanyak, dalam hal perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana, saat ini

Pantai Biru menggunakan pembiayaan dari dana desa. Berdasarkan keterangan yang didapat, bahwa kepala desa belum menggunakan sponsor atau kerjasama dari pihak lain dalam pembangunan dan pengembangan Pantai Biru (Nasrulloh *et al.*, 2023). Pengembangan wisata desa merupakan suatu usaha dalam pemenuhan fasilitas-fasilitas untuk menunjang sebuah pariwisata dan menjadi daya tarik para wisatawan. Peran dari masyarakat juga penting bagi pariwisata sebagai pengembangan wisata baik dari segi sumber daya dan keunikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal dalam desa tersebut. Menurut Prihanta *et al.*, (2022) keberhasilan dalam pengembangan pariwisata tergantung pada tingkat partisipasi dari masyarakat, karena dapat dikatakan bahwa masyarakat sebagai tuan rumah dan pelaku utama dari keseluruhan tahapan yaitu dari segi perencanaan dan penganggaran. Tahapan perencanaan wisata yang merupakan tahapan yang paling dasar terutama pada pengembangan wisata desa. Tahapan perencanaan wisata desa akan melibatkan masyarakat dalam menyusun sebuah rencana dengan tujuan untuk mengetahui potensi wisata yang dapat dikembangkan dan teknik pengembangan wisatanya. Adanya tujuan tersebut agar terencana dengan baik, jika tidak dapat mengakibatkan perencanaan yang belum matang dan berdampak pengelolaan wisata yang tidak seimbang dan mengalami penurunan daya tarik wisata desa tersebut. Maka, penyusunan rencana harus dilakukan dengan baik dan matang, serta didukung dengan penganggaran keuangan yang memadai.

Seperti penelitian pendahuluan Susanawati & Pristiria, (2019) bahwa perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan pelibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dengan tujuan agar program dan anggaran dapat

terlaksana dengan optimal. Pada Penelitian Baihaqi *et al.*, (2019) juga memaparkan bahwa pentingnya perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan sebuah desa dengan keterlibatan partisipasi masyarakat agar mengurangi permasalahan-permasalahan melalui perencanaan yang terstruktur dengan penganggaran yang seimbang.

Proses perencanaan dan penganggaran desa adalah suatu desa yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dengan memiliki wisata, salah satunya adalah proses perencanaan dan penganggaran desa wisata. Perencanaan yang terstruktur dengan baik membantu kegiatan lebih terarah, sehingga pembangunan akan berdampak pada meningkatnya sosial ekonomi dan permasalahan-permasalahan dalam desa dapat terselesaikan dengan baik. Perencanaan dan penganggaran tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian tujuan pembangunan dengan penganggaran yang tepat akan menghasilkan kinerja secara optimal dalam perencanaan wisata desa.

Namun, dari penelitian pendahuluan permasalahan yang muncul yaitu, dalam perencanaan Desa Telaga Biru adalah tidak tersedia dokumen secara resmi, ketidaktahuan atau ketidakpedulian perangkat desa atau pengelola wisata tentang dokumen rencana desa/wisata desa, padahal setiap tahun selalu ada pengembangan pembangunan desa maupun wisata desa. Menurut Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 adalah perencanaan pembangunan desa sudah menjadi agenda rutin dan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan tiap tahun disusun secara berjangka semua ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Penelitian pendahuluan dari segi penganggaran, yakni dalam proses anggaran Desa Telaga Biru bersifat langsung, artinya jika memiliki anggaran desa maka langsung digunakan untuk pengembangan Wisata Pantai Biru, tanpa harus dibuat susunan atau dokumen anggaran desa. Padahal, menurut Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semua kinerja pembangunan desa harus terencana dalam APB Desa. Menurut Amiruddin *et al.*, (2012) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa sebagai mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dibutuhkan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Telaga Biru?
2. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Wisata Desa Pantai Biru?
3. Bagaimana integrasi perencanaan dan penganggaran desa dan perencanaan dan penganggaran wisata desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Telaga Biru.
2. Mengidentifikasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Wisata Desa Pantai Biru.
3. Menjelaskan kesesuaian dengan konseptual dalam proses perencanaan dan penganggaran desa dan perencanaan dan penganggaran wisata desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan analisis terkait perencanaan dan penganggaran desa dan wisata desa

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pengelola Wisata

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dari tahap dasar yakni merencanakan program serta sistem pengelolaan pariwisata agar dapat berjalan khususnya pada Wisata Desa Pantai Biru.

b. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah tentang perencanaan pariwisata di Indonesia khususnya di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, serta mengetahui perencanaan Wisata Desa Pantai Biru.

c. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Sebagai pengetahuan terutama pengetahuan wisata di Pantai Biru. Selain itu, sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya alam yang dimiliki.

d. Manfaat bagi Penelitian

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang pariwisata.